



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11950-11958

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Pembiayaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada Masyarakat di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

Delvi Oktavia, Iiz Izmuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[oktaviadelvi595@gmail.com](mailto:oktaviadelvi595@gmail.com), [lizmuddin@gmail.com](mailto:lizmuddin@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan X Koto melalui penyediaan modal usaha. Meskipun program ini menunjukkan pertumbuhan jumlah nasabah yang signifikan, terdapat kendala operasional berupa keterbatasan dana kelolaan yang menyebabkan proses pencairan dana memakan waktu hingga dua bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap mekanisme penggunaan dana bergulir tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan 11 informan yang terdiri dari Direktur BUMNag, Wali Nagari, serta nasabah pengguna SPP di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap program SPP. Pada tahap pemahaman, masyarakat menilai prosedur administrasi sederhana dan mekanisme tanggung renteng efektif dalam mempermudah akses modal tanpa agunan fisik. Pada tahap evaluasi, petugas BUMNag dinilai profesional, ramah, dan komunikatif. Manfaat utama yang dirasakan mencakup peningkatan pendapatan keluarga, pengembangan usaha mikro, serta perlindungan masyarakat dari praktik rentenir. Namun, terdapat persepsi negatif terkait hambatan operasional, yaitu keterlambatan pencairan dana akibat keterbatasan modal BUMNag serta rendahnya plafon pinjaman bagi anggota baru. Selain itu, kewajiban mengikuti masa pembinaan selama enam bulan bagi kelompok baru dianggap cukup menyita waktu. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada upaya penambahan modal dan peningkatan intensitas sosialisasi agar masyarakat lebih memahami regulasi serta prosedur yang berlaku. Hasil ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola BUMNag untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan.*

*Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Dana Bergulir, SPP, BUMNag Bersama Lemersing Mandiri*

### **1. Pendahuluan**

Nagari-nagari di Sumatera Barat salah satunya di kecamatan x Koto diwajibkan mampu memberdayakan serta menopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini, Otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada perangkat daerah (nagari) untuk mendelegasikan tanggung jawab. Berikutnya adalah pengaturan, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian Nagari adalah melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag merupakan badan hukum yang dipimpin oleh pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari berperan dalam menciptakan usaha-usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Nagari. Selanjutnya, pengelolaan usaha ini akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan warga setempat.

Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) akan mendorong peningkatan dan penguatan ekonomi nagari. Hal ini dicapai melalui dua peran utamanya. Pertama, BUMNag berfungsi sebagai lembaga komersial yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Kedua, BUMNag juga berperan sebagai lembaga sosial yang melayani masyarakat, menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan adanya kewenangan bagi nagari untuk mengelola daerahnya sendiri, secara tidak langsung terbuka pula kesempatan bagi nagari untuk melaksanakan

program-program pembangunan prioritas, serta membina dan memberdayakan masyarakatnya. Otonomi daerah nagari ini berfungsi agar masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.

Pembangunan Perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu tujuan utama negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan perempuan. Salah satu program yang diluncurkan adalah Program Simpan Pinjam Khusus (SPP) Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui perputaran modal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut Halim, kegiatan simpan pinjam (SPP) perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perempuan melalui pengelolaan simpan pinjam, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memperlancar akses pembiayaan bagi usaha mikro, memenuhi kebutuhan dasar keuangan sosial, dan memperkuat kelembagaan yang fokus pada kegiatan perempuan.

Simpan pinjam perempuan (SPP) dipandang sebagai subjek aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, bukan sekadar objek. Melalui mekanisme kelompok, para anggota saling mengenal sehingga memudahkan interaksi dan pengawasan dalam pendistribusian dana. Program ini telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan X Koto, dan terbukti memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Data operasional, terdapat dinamika yang menarik pada pertumbuhan jumlah nasabah dan total pinjaman yang disalurkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri selama kurun waktu dua tahun terakhir. Peningkatan jumlah nasabah ini mengindikasikan bahwa kehadiran program SPP sangat dibutuhkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. hal tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 1. Data nasabah Simpan Pinjam Perempuan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri 2023-2024 X Koto**

Tahun	Program	Nasabah	Jumlah pinjaman
2023	Simpan pinjam perempuan	1303	2.000.000- 15.000.000
2024	Simpan pinjam perempuan	1355	2.000.000-15.000.000

Sumber : Laporan Tahunan BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri

Meskipun terdapat pertumbuhan secara kuantitatif, penelitian lapangan menemukan adanya kendala operasional yang krusial. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan ketersediaan dana yang mengakibatkan keterlambatan pencairan hingga memakan waktu sekitar dua bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan program tidak ada pada jumlah dana saja, tetapi juga aspek subjektif seperti kualitas layanan.

Keterlambatan tersebut berpotensi menggeser persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan keberlanjutan program. Persepsi merupakan faktor psikologis penting karena pandangan positif akan melahirkan motivasi yang benar, sementara pandangan negatif dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program peminjaman modal ini. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai sudut pandang nasabah menjadi sangat relevan.

Selain kendala dana, terdapat tantangan internal berupa kurangnya kesadaran sebagian perempuan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Persepsi yang keliru dalam memahami fungsi pinjaman modal usaha dapat menghambat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan yang diharapkan. Hal ini memperkuat perlunya evaluasi terhadap transparansi dan kepuasan nasabah secara menyeluruh.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada indikator kualitas layanan, transparansi, serta faktor manfaat dan kendala yang membentuk pandangan masyarakat. Fokus utamanya mencakup persepsi terhadap mekanisme akses pembiayaan dan bagai mana keuntungan yang dapat dirasakan perempuan di Kecamatan X Koto.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini disusun dengan judul "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pembiayaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

pada Masyarakat di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri di Kecamatan X Koto". Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pengelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan, di mana data dan informasi diperoleh secara langsung dari informan yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang situasi saat ini, Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yang bersifat primer dan sekunder. Teknik yang diterapkan untuk menghimpun informasi meliputi pengamatan, percakapan, dan pengumpulan dokumen, serta menerapkan cara reduksi, penyampaian, dan penarikan kesimpulan atau validasi dalam pengolahan data. Lokasi penelitian ini adalah BUMNag Kecamatan X Koto.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Persepsi masyarakat

Persepsi dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *perception*, sedangkan dalam Bahasa Latin disebut *perceptio*; berasal dari *percipere*, yang secara etimologis berarti menerima atau mengambil. Sobur, dan Sarwono. Persepsi adalah pengalaman atau makna yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau hubungan yang diperoleh melalui pengambilan kesimpulan informasi dan melakukan interpretasi atau penafsiran pesan. Definisi dari berbagai ahli telah memberikan yang beragam tentang persepsi, meskipun pada prinsipnya mengandung makna yang sama alat indera seperti mata dan telinga, serta rangsangan yang diterima oleh reseptor, akan dikirim ke otak atau sistem saraf, kemudian diatur dan diinterpretasikan sebagai bagian dari proses psikologis. Persepsi pada dasarnya adalah cara seseorang melihat atau memberikan makna terhadap objek atau kejadian yang ada. Fielman (1999) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses yang bersifat konstruktif yang melibatkan penerimaan rangsangan serta usaha untuk memahami keadaan yang ada. Persepsi menjelaskan bagaimana suara, sentuhan, rasa, dan bau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman yang dialami seseorang.

Persepsi adalah elemen psikologis yang sangat penting dalam membentuk cara seseorang memahami dan menilai objek atau fenomena di sekitarnya. Dalam studi psikologi, persepsi dilihat sebagai proses di mana seseorang menerima rangsangan melalui indera, lalu memproses dan menafsirkan informasi tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman dan arti tertentu tentang lingkungan. Bimo Walgito menyatakan bahwa persepsi dimulai dengan penginderaan, yaitu saat stimulus diterima oleh alat indera, kemudian informasi itu dikirim ke otak agar diproses, sehingga seseorang dapat menyadari apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. (Walgito, 1989) Sementara itu, Stephen P. Robbins menjelaskan persepsi sebagai proses ketika seseorang menyusun dan menginterpretasikan kesan dari indera untuk memberikan makna pada lingkungannya.

persepsi masyarakat perempuan tidak diukur secara tunggal, melainkan dianalisis berdasarkan dimensi-dimensi krusial yang relevan. Dimensi-dimensi tersebut mencakup Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan (seperti kecepatan dan kemudahan proses), Persepsi terhadap Manfaat dan kendala Program (dampak ekonomi yang dirasakan), Dimensi-dimensi ini akan menjadi kerangka kategorisasi data wawancara yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan penjelasan Slameto, persepsi adalah proses yang melibatkan penerimaan pesan atau informasi ke dalam pikiran manusia. Persepsi berfungsi sebagai elemen psikologis individu yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seseorang. pemahaman yang bervariasi dari karakter setiap individu, dan menghasilkan keragaman. mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011:11) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan pelayanan umum menurut Moenir (2010:26) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sinambela (2011:5) berpendapat pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Obejek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek

Persepsi masyarakat/nasabah dapat dilihat dari berbagai indikator persepsi dan faktor- faktor baik faktor internal dan faktor eksternal.

1. Indikator Persepsi

Dalam konteks pembiayaan atau layanan publik, persepsi biasanya diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan bagaimana individu menerima dan menilai suatu objek:

- a. Pengetahuan (Knowledge) Tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan manfaat program SPP.
  - b. Penilaian/Evaluasi (Evaluation) Pandangan masyarakat terhadap kualitas layanan, seperti kecepatan pencairan dana dan kemudahan administrasi.
2. Faktor Internal (Dari dalam diri individu)
- a. Pengalaman Masa Lalu Pengalaman sebelumnya dalam meminjam dana memengaruhi cara nasabah menilai layanan saat ini.
  - b. Kebutuhan & Motivasi Urgensi kebutuhan modal usaha akan membuat nasabah cenderung memiliki persepsi tertentu terhadap kemudahan akses dana.
  - c. Kepribadian & Nilai Keyakinan individu (misalnya pemahaman mengenai syariah atau etika berhutang).
3. Faktor Eksternal (Dari lingkungan)
- a. Informasi yang Diterima Kejelasan sosialisasi dari pihak BUMNag mengenai dana bergulir.
  - b. Lingkungan Sosial Pengaruh atau testimoni dari sesama anggota kelompok simpan pinjam di Kecamatan X Koto.
  - c. Situasi Fisik Lokasi kantor, keramahan staf, dan efisiensi birokrasi dalam proses pencairan dana.

### **Pengertian Dana Bergulir**

Pengertian dana penjelasan dari Ardiyos dan Eka Purwati mengatakan bahwa Dana itu adalah uang, alat keuangan, dan barang-barang lain yang disimpan dengan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Dana adalah sumber penting yang dibutuhkan setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya.

Tujuan dari Dana Bergulir adalah untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, sehingga pendapatan mereka bisa meningkat dan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Dengan menyediakan akses terhadap modal, dana bergulir dapat berfungsi sebagai alat yang penting untuk mengurangi kemiskinan struktural.

Dana yang digunakan sebagai modal usaha bisa menggairahkan penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan lokal atau komunitas dengan mengoptimalkan sektor-sektor usaha yang berpotensi. Selain itu, dana ini memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kecil Banyumas Penomoran 14 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Kapital Dukungan Finansial Bergulir, pinjaman bergulir adalah pembiayaan yang sumber dananya berasal dari Sumber Daya Keuangan Daerah dan dikelola secara khusus, dalam kurun waktu tertentu. Uang yang diterima dari pengembalian angsuran akan disalurkan kembali

### **Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

Program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan merupakan inisiatif yang menyediakan dana modal bagi kelompok wanita yang aktif dalam aktivitas simpan pinjam. Secara umum, program ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kegiatan simpan pinjam di pedesaan, memudahkan akses pendanaan bagi bisnis kecil, memenuhi keperluan dasar pendanaan sosial, serta memperkuat struktur organisasi wanita dan mendorong kenaikan penghasilan keluarga berpendapatan rendah.

Menurut Halim, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah suatu aktivitas yang dijalankan oleh wanita dengan cara mengatur dana simpanan dan pinjaman, dengan harapan untuk meningkatkan potensi kegiatan simpan pinjam di wilayah pedesaan, mempermudah akses terhadap pembiayaan usaha kecil, memenuhi kebutuhan pembiayaan sosial yang mendasar, dan memperkuat institusi yang berfokus pada kegiatan-kegiatan wanita.

Simpan pinjam, menurut Rudianto, merujuk pada koperasi yang fokus pada pengumpulan uang simpanan dari anggota, yang selanjutnya akan dipinjamkan lagi kepada anggota yang membutuhkan dana.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang berfokus pada pengumpulan modal melalui simpanan yang dilakukan oleh anggota secara rutin dan berkesinambungan. Selanjutnya, dana tersebut akan dipinjamkan kembali kepada anggota dengan cara yang sederhana, terjangkau, cepat, dan tepat guna untuk keperluan yang bersifat produktif serta peningkatan kesejahteraan.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah kegiatan pemberian permodalan kepada kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin

SPP bertujuan untuk mengatasi kesulitan perempuan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal yang seringkali mensyaratkan agunan atau prosedur rumit. Dengan SPP, perempuan dapat memperoleh pinjaman modal usaha dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan SPP juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial. Melalui keanggotaan dalam kelompok SPP, perempuan diajak untuk berdiskusi, belajar mengelola keuangan, dan membangun jaringan sosial yang saling mendukung. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Tujuan Umum SPP ini bertujuan untuk mendukung kegiatan simpan pinjam di desa, serta memastikan akses terhadap pembiayaan usaha kecil, memenuhi permintaan dana untuk kebutuhan sosial dasar, memperkuat organisasi perempuan, serta membantu mengurangi jumlah rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja.

Tujuan Khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Perdesaan (2008: 57), sasaran khusus dari Simpan Pinjam Perempuan adalah:

- a. Mempelancar pemenuhan kebutuhan baik dalam hal pendanaan maupun aspek sosial dasar.
- b. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga mereka melalui modal yang diberikan.
- c. Memberikan kekuatan organisasi simpan pinjam yang dikelola oleh wanita.

Sesuai dengan peraturan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), anggaran yang disediakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif serta layanan simpan pinjam, diharuskan bersifat pinjaman yang perlu dikembalikan dan kemudian dialokasikan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya (dana pinjaman bergulir). Diharapkan aktivitas ini dapat:

- a. Meningkatkan usaha yang ada.
- b. Memperluas peluang kerja serta sumber penghasilan.
- c. Mengembangkan ekonomi di komunitas pedesaan.
- d. Menyediakan dana yang mudah diakses dan membawa manfaat terus menerus.

Jenis akad yang digunakan dalam SPP adalah Akad mudharabah yang merupakan jenis investasi yang didasarkan pada kepercayaan. Unsur utama pada akad mudharabah adalah keyakinan, yang datang dari pemodal kepada pengelola. Hal ini sangat penting karena pemodal tidak dapat terlibat dalam pengelolaan usaha yang didanai menggunakan uang mereka, kecuali memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana.

Mudharabah adalah jenis akad dalam fikih muamalah yang melibatkan kolaborasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ditimbulkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah merupakan bentuk akad dalam hukum muamalah Islam yang diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah, di mana terdapat kerjasama antara dua pihak yang setuju untuk menjalankan suatu usaha. Dalam kerjasama ini, satu pihak bertugas sebagai penyedia dana atau modal, yang disebut dengan shahibul maal, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha, yang dikenal sebagai mudharib. Semua dana untuk usaha diserahkan sepenuhnya oleh pemilik modal kepada pengelola tanpa ikut campur langsung dalam operasional bisnis. Pengelola kemudian melaksanakan kegiatan usaha tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan yang telah dibuat di awal Kerjasama

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.

Mudharabah dibangun atas kolaborasi usaha antara shahibul maal (investor) dan mudharib (pengelola usaha). Beban biaya usaha menjadi tanggung jawab bersama antara shahibul maal dan mudharib. Apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib, maka shahibul maal yang bakal menanggungnya. Sebaliknya, jika kerugian terjadi karena kesalahan mudharib, maka sang mudharib yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad ini digunakan untuk pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam konteks simpan pinjam, akad mudharabah dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perempuan dengan sistem bagi hasil.

### **BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri**

BUMNag Bersama Lemersing Mandiri merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank yang didirikan pada 14 Desember 2022 melalui pertemuan antar nagari (MAN). Lembaga ini terletak di Stasiun, Jorong Pasa Rabaa, Nagari Panyalaian, di Kecamatan X Koto. Misi utamanya adalah memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan X Koto, untuk mendapatkan modal usaha guna pengembangan usaha mereka. Semua ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan.

BUMNAG Bersama berfungsi sebagai badan hukum yang dibentuk oleh nagari-nagari yang menjadi pendiri untuk mengelola bisnis, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan dan bisnis lainnya demi kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari yang terdapat di Kec. X Koto. Tujuan dari pendirian BUMNAG ini adalah untuk memajukan usaha masyarakat serta pelayanan umum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan fokus utama pada masyarakat di Kec. X Koto.

BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri merupakan hasil perubahan dari UPK Lemersing Mandiri yang sebelumnya terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM mandiri ini merupakan jenis dukungan keuangan berupa hibah yang diperoleh dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), di mana sebagian besar, yaitu 75%, digunakan untuk proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan atau infrastruktur lain seperti polindes dan

sejenisnya. Sementara itu, 25% dari dana tersebut dialokasikan sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu inisiatif dari lembaga keuangan non-bank yang berfokus untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Program ini diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 dan dihentikan pada era pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014, karena dinilai tidak efektif. Ketika PNPM Mandiri Perdesaan dibubarkan, maka setiap desa/nagari diberi kesempatan untuk mandiri, sehingga diperkenalkan dana sebesar 1 milyar rupiah untuk setiap desa/nagari oleh Jokowi. Dana 1 milyar ini mencakup biaya operasional serta pembangunan fisik yang alokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat Tim 6 nagari, yang terdiri dari Ketua BPRN, Ketua KAN, Wali Nagari, FKPM, Bundo Kandung, dan PKK nagari. Dalam forum tersebut, setiap Jorong diharuskan untuk mengajukan proposal pembangunan. Di tahun 2015, inisiatif ini bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa yang diatur secara mandiri oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dihentikan sebelumnya. UPK dibentuk dengan tujuan yang mirip dengan PNPM Mandiri, yakni untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif di sektor UMKM, yang menjadi fokus dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK juga dihadirkan sebagai pilihan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman dana secara cepat dengan sistem berkelompok.

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa. Dalam Bab XVI Ketentuan lain, Pasal 73 Ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana bergulir untuk masyarakat yang sebelumnya merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) perdesaan harus diubah menjadi BUMDesa Bersama. Proses perubahan dari UPK yang sebelumnya merupakan bagian PNPM ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 2 tahun sejak PP tersebut ditetapkan. BUMDesma ini didirikan sebagai representasi pengelolaan aset dana bergulir yang berasal dari PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini juga menjadi dasar berdirinya BUMNag Bersama Lemersing Mandiri, yang sebelumnya dikenal sebagai UPK Lemersing Mandiri dari PNPM Mandiri Perdesaan.

BUMNag Bersama Lemersing Mandiri merupakan institusi keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, yang didirikan pada 14 Desember 2022. Pendirian ini ditetapkan melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang sekaligus membahas peraturan yang diterima bersama oleh Wali Nagari, melibatkan para pengelola dana bergulir dari Kecamatan X Koto serta pihak-pihak yang merumuskan AD/ART transformasi UPK eks PNPM. Pendekatan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dalam mengatur usaha dapat dianggap sukses, terbukti bahwa lembaga ini menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam hal penyertaan modal yang mencapai 10 kali lipat dari ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah. Jika penyertaan modal yang disyaratkan adalah Rp. 5.000.000.- per nagari, jumlah tersebut ternyata tidak cukup untuk membangun usaha yang signifikan. Oleh karena itu, dengan dukungan Pemerintah Kecamatan, disetujui agar setiap nagari memberikan penyertaan modal minimal sebesar Rp. 50.000.000.-. Dana tersebut kemudian dikelola oleh BUMNAG Bersama untuk mendirikan usaha baru. Mengingat sebagian besar warganya adalah petani, dan banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dana SPP untuk kebutuhan pupuk atau pestisida, BUMNAG mengambil inisiatif untuk mendirikan kios pupuk yang dinamakan Lemersing Agro Mandiri, yang resmi dibuka pada bulan Agustus 2023. Selain menciptakan Unit Usaha, BUMNag juga terus berinovasi demi perkembangan kios pupuk tersebut. Salah satu keunggulan Lemersing Agro Mandiri adalah kerjasama dengan perusahaan di sektor pertanian yang memberikan pendampingan dan sosialisasi tentang teknik bercocok tanam yang baik, termasuk cara penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat.

Selain itu, terdapat Unit Usaha lainnya yang dikelola oleh BUMNAG Bersama Lemersing Mandiri, yaitu Unit Usaha ATK yang dikenal dengan nama Toko Buku Lemersing atau Lemersing Stationery. Toko Buku Lemersing ini menawarkan berbagai jenis alat tulis beserta aksesorisnya yang lengkap. Dari sisi harga juga tidak berbeda dengan yang ada di pasar, sehingga pelanggan tidak perlu pergi jauh-jauh ke pasar untuk membeli alat tulis.

### **1. Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Dan Kemudahan Akses Program Dana Bergulir Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri**

Persepsi atau pandangan adalah sesuatu yang sangat penting untuk seseorang dalam mengambil keputusan. Begitu juga keputusan masyarakat akan menggunakan dana bergulir simpan pinjam perempuan. Secara umum masyarakat memiliki beragam pendapat mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan yang dipenuhi, kecepatan layanan, keterjangkauan BUMNAG dalam berinteraksi.

Persepsi Terhadap Proses dan Kemudahan Akses Secara umum, masyarakat menilai bahwa mekanisme pengajuan pinjaman pada program SPP relatif mudah dipahami dengan persyaratan administrasi yang sederhana. Sistem tanggung renteng melalui pembentukan kelompok dianggap efektif dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan pengawasan sosial antar anggota. Namun, terdapat prosedur persiapan yang dinilai cukup ketat bagi kelompok baru, yakni adanya kewajiban mengikuti pembinaan selama enam bulan sebelum dapat mengajukan pinjaman. Pengetahuan masyarakat mengenai sulitnya akses ke perbankan formal menjadi dasar persepsi bahwa program ini merupakan solusi keuangan yang lebih mudah dijangkau bagi pelaku usaha mikro

Masyarakat memiliki pandangan positif mengenai akses dan proses program SPP, yang dapat dilihat dari dua indikator menurut teori Bimo Walgito:

- a. Tahap Pemahaman Masyarakat merasa bahwa cara mengajukan pinjaman dan persyaratan dari BUMNag mudah dimengerti. Namun, ada kesan bahwa prosedur awal cukup rumit dan membutuhkan waktu, terutama terkait kewajiban pelatihan selama 6 bulan bagi kelompok baru sebelum dana dapat dicairkan.
- b. Tahap Evaluasi Masyarakat menganggap petugas BUMNag profesional, ramah, dan komunikatif dalam memberikan bantuan. Namun, dalam hal kecepatan layanan, ada pendapat bahwa proses dari pengajuan proposal hingga pencairan sering kali memakan waktu sekitar 2 bulan, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan dana di BUMNag. Selain itu, plafon pinjaman awal untuk anggota baru dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang lebih besar.

## **2. Faktor-faktor (manfaat dan kendala) yang membentuk pandangan masyarakat terkait keberlanjutan penggunaan pembiayaan Dana Bergulir SPP tersebut**

Pandangan masyarakat mengenai keberlanjutan program SPP dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, yang terdiri dari manfaat nyata dan kendala yang dirasakan:

1. Faktor Internal (Dalam Diri Masyarakat)
  - a. Pengalaman dan Ingatan: Pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan petugas BUMNag dan riwayat keberhasilan dalam mengelola pinjaman sebelumnya sangat menentukan tingkat kepercayaan mereka.
  - b. Kebutuhan Ekonomi: Kebutuhan mendesak akan modal usaha tanpa agunan mendorong masyarakat untuk mempersepsikan program ini sebagai kebutuhan pokok dalam menjaga kelangsungan usaha mikro mereka.
2. Faktor Eksternal (Karakteristik Program dan Lingkungan)

Manfaat Nyata (Stimulus Eksternal) Manfaat nyata berupa peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan skala usaha, dan kemudahan akses modal menjadi stimulus utama yang membentuk persepsi positif. Kehadiran program ini juga dipersepsikan sebagai perlindungan dari jeratan rentenir.

Kendala Operasional Adanya hambatan berupa ketersediaan dana yang terbatas dan proses verifikasi awal yang memakan waktu lama bagi kelompok baru menjadi faktor eksternal yang menimbulkan sedikit ketidakpuasan.

Sistem Angsuran dan Plafon Fleksibilitas sistem angsuran (mingguan) yang sesuai dengan perputaran arus kas usaha kecil sangat mempengaruhi kenyamanan nasabah dalam menggunakan fasilitas ini.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa “Analisis persepsi masyarakat mengenai penggunaan dana bergulir simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di masyarakat BUMNAG bersama lemersing mandiri di kecamatan x koto” menunjukkan hasil yang positif. Namun, terdapat kendala karena keterbatasan dana yang tercermin dalam pandangan nasabah atau masyarakat, dilihat dari indikator pandangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. 1). Masyarakat memiliki pandangan positif mengenai akses dan proses program SPP, yang dapat dilihat dari dua indikator menurut teori Bimo Walgito: a). Tahap Pemahaman

Masyarakat merasa bahwa cara mengajukan pinjaman dan persyaratan dari BUMNag mudah dimengerti. Namun, ada kesan bahwa prosedur awal cukup rumit dan membutuhkan waktu, terutama terkait kewajiban pelatihan selama 6 bulan bagi kelompok baru sebelum dana dapat dicairkan. b). Tahap Evaluasi Masyarakat menganggap petugas BUMNag profesional, ramah, dan komunikatif dalam memberikan bantuan. Namun, dalam hal kecepatan layanan, ada pendapat bahwa proses dari pengajuan proposal hingga pencairan sering kali memakan waktu sekitar 2 bulan, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan dana di BUMNag. Selain itu, plafon pinjaman awal untuk anggota baru dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang lebih besar. c). Pandangan masyarakat mengenai keberlanjutan program SPP dilihat dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, yang terdiri dari manfaat nyata dan kendala yang dirasakan: a). Manfaat Nyata Program SPP sangat membantu meningkatkan akses modal bagi perempuan yang sebelumnya sulit masuk ke lembaga keuangan formal karena tidak ada agunan. Manfaat lain termasuk terciptanya pendapatan tambahan bagi keluarga, pengembangan bisnis mikro (seperti warung dan pertanian), dan mengurangi ketergantungan pada rentenir. b). Kendala Hambatan utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat adalah kurangnya dana bergulir, yang menyebabkan penundaan pencairan dana. Selain itu, proses administrasi untuk memperbarui data kelompok dan ketatnya peraturan pelatihan awal juga menjadi kendala.

## Referensi

1. Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 99-100'
2. Basrowi, Suwandi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2008, p. 266
3. Dewi, Yenty Astari, and Iiz Izmuddin, 'Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Pada Unit Usaha BUMNAG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Nagari, *Jurnal Of Economic Studies* Vol. 2 , No. 2, Juli-Desember 2018', 2.2 (2018)
4. Dhastra, Sejarah Singkat PNPM Sampai Bumdesma [https:// www. Dhastra. Web .Id/ Sejarah-Singkat-Pnpm-Sampai-Kepada-Bumdesma/](https://www.dhastra.web.id/sejarah-singkat-pnpm-sampai-kepada-bumdesma/), Diakses Pada Tanggal 7 April 2025.
5. Fitriana, Saghifa, Vembria Rose Handayani, and Pamela Dharmaniarti, 'Sistem Informasi Peminjaman Dana Bergulir Untuk Umkm Berbasis Web Pada Dinnakerkop Ukm Kabupaten Banyumas', *Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 13.1 (2021), p. 2021
6. Hamdi, -, Hartrisari Hardjomidjojo, and Amiruddin Saleh, 'Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Kecamatan Semparuk, Sambas', *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 8.2 (2013), pp. 155-69, doi:10.29244/mikm.8.2.155-169
7. Handayani, Deby, Sudirman Sudirman, and Dedi Mardianto, 'Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Kelompok Perempuan Di Kecamatan Padang Sago', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2.1 (2023), pp. 49-53, doi:10.47233/jppisb.v2i1.683
8. Hikmah, Sofi Faiqotul, 'Tradisi Dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah Pada Jamaah Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi', *Hukum Islam, Ekonomi, Dan Bisnis*, 10.1 (2024), pp. 89-106, doi:10.30739/istiqlom.v10i1.2188
9. Laisa Liza, 'Pengaruh Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat', *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1.2 (2022), pp. 87-96, doi:10.61393/heiema.v1i2.76
10. Larasati, Riris Dewi, and Yudhanta Sambharakreshna, 'Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)', *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 8.1 (2016), pp. 35-49
11. Makmun Khairani, Psikologi Umum (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013), 63-65.'
12. Maulidiah, Eka Putri, Survival Survival, and Bambang Budiantono, 'Pengaruh Fasilitas Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Implikasinya Pada Kepuasan Pelanggan', *Jurnal Economina*, 2.3 (2023), pp. 727-37, doi:10.55681/economina.v2i3.375
13. Sinollah, S. Sos, M.AB, 'Peran Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Dialektika, Volume 4, Nomor 2, September 2019 The*, pp. 31-38
14. Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*, 2019
15. Sudanto, Muhammad rafif, and Novita Maulida Ikmal, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Online Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Kantor Kelurahan Made', *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2.2 (2022), pp. 1-21, doi:10.38156/jisp.v2i2.138